

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu pilar dalam proses perantara keuangan yang bertujuan untuk membangun perekonomian rakyat (Bakhri, 2017). Mengacu pada Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemerdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota masyarakat, para pengelola simpanan maupun pemberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga ini merupakan bagian kesatuan dari tata kelola yang dibentuk sesuai dengan lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Masyarakat pedesaan yang belum tersentuh bank umum komersial dapat dilayani melalui lembaga keuangan yang aturan-aturannya tidak rumit serta mekanisme penyimpanan dan peminjaman kredit yang sederhana.

Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yang diterapkan di Indonesia khususnya di Bali, salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa. Menurut Ramantha (2018) LPD merupakan jenis lembaga

keuangan mikro milik desa adat di Bali. Keberadaan LPD dilandasi oleh Peraturan Daerah Bali No.3 Tahun 2017. Lembaga ini tumbuh dan berkembang secara bertahap di masing-masing desa adat. LPD mampu memberdayakan krama desa adat setempat serta berkontribusi meningkatkan kertrampilan krama dalam upaya membentuk jiwa kewirausahaan sehingga, tujuan didirikannya LPD untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah, penyaluran modal yang efektif, menciptakan pemerataan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, menciptakan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran dapat diwujudkan.

LPD sebagai Lembaga Keuangan Desa bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana produk layanan yang ditawarkan LPD dalam usahanya adalah melalui tabungan, deposito, simpanan dan pinjaman dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk penyaluran kredit yang efektif. LPD memberikan layanan keuangan kepada semua masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin. Pelayanan yang diberikan oleh LPD sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu prosedur yang sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal dan kedekatan lokasi dengan nasabah.

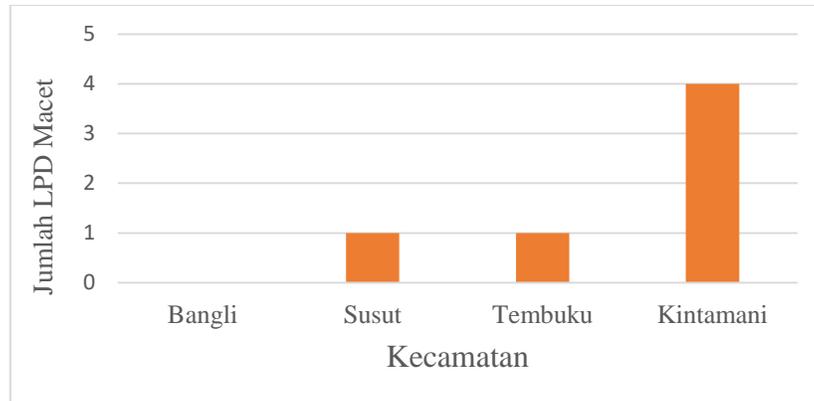
LPD merupakan faktor keberhasilan dalam membina kepercayaan masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat memiliki rasa keamanan dalam menyimpan dan meminjam uang di Lembaga Perkreditan Desa. Kedekatan budaya dan psikologis dengan nasabah, serta sifat bisnis yang fleksibel menjadi kekuatan dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja LPD sebagai lembaga keuangan mikro, serta kelangsungan hidup dan persaingan dengan lembaga

keuangan sejenis. Namun terdapat beberapa permasalahan yang saat ini sedang mengancam LPD di Bali yaitu kualitas dan efektivitas tata kelola pada kebanyakan LPD cukup mengkhawatirkan serta pengaturan dan pengawasan LPD kurang efektif hal tersebut dibuktikan dari banyaknya permasalahan yang dialami oleh LPD. Dari total 1.436 LPD di Bali tidak semuanya dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut memberikan pengaruh pada kinerja dari LPD.

Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala. Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan (Andriana & Panggabean, 2017). Penilaian kinerja keuangan suatu organisasi memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan laba, jika kinerja keuangan perusahaan baik maka laba akan meningkat. Aspek keuangan berpredikat sehat mencerminkan bahwa kinerja keuangan LPD tersebut baik. Oleh karena itu, kinerja keuangan sangatlah penting bagi Lembaga Perkreditan Desa.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani. Kecamatan Kintamani merupakan Kecamatan yang memiliki LPD paling banyak di antara kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bangli. Berdasarkan penilaian Lembaga Pemerdayaan LPD, Kepala Bidang Adat beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2022 tercatat 159 LPD di Kabupaten Bangli dengan kategori sehat hanya 91 unit, sedangkan sebanyak 33 unit yang dikategorikan cukup sehat, 22 unit kurang sehat, 7 unit sakit dan 6 unit yang tidak beroperasi.

Berikut tabel kondisi kesehatan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli pada tahun 2022.



Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kemacetan LPD

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa terdapat Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli yang mengalami kemacetan sehingga tidak beroperasi lagi. Dari 159 LPD yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, terdapat 6 LPD yang dikategorikan macet, yaitu di Kecamatan Susut, Tembuku dan Kintamani. Hal ini diduga bahwa 6 LPD tersebut mengalami masalah pada SDM yang kurang mampu mengelola keuangannya, namun di Kecamatan Kintamani terlihat lebih banyak LPD yang mengalami kemacetan dibandingkan dengan LPD yang ada di Kecamatan Susut dan Tembuku. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.

Sianturi (2019) menyatakan prinsip transparansi, independensi dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja keuangan. Mahaendrayasa dan Putri (2017) menyatakan prinsip kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Wirawan

dan Putri (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh tanggung jawab. Putri and Muid (2018) menyatakan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Wiendy Indriati (2018) menyatakan dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi kinerja keuangan. Lubis dan Ovami (2018) menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Jadi, dapat disimpulkan variabel - variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah prinsip-prinsip GCG yang meliputi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran yang mempengaruhi kinerja keuangan. Karena, variabel transparansi, independensi, akuntabilitas berpengaruh dominan pada penelitian Sianturi (2019), selain itu variabel kewajaran berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada penelitian Mahaendrayasa dan Putri (2017), serta variabel tanggung jawab berpengaruh dominan pada penelitian Wirawan dan Putri (2018).

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan bahwa pemangku kepentingan berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaan akan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, sehingga diharapkan kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan LPD dalam mengungkapkan informasi tentang kondisi LPD,

maka semakin besar kepercayaan prinsipal, sehingga kinerja LPD akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Anggayana & Wirajaya (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nareswari dan Budiarta (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal senada juga dijelaskan dalam penelitian Mahaendrayasa dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Cahya (2017) pada PT. BRI Tbk. yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab perusahaan atas kinerja secara transparan dan adil kepada pemangku kepentingan. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang pada akhirnya akan memajukan perusahaan. Semakin jelas wewenang dan fungsi pelaksana dan tanggung jawab struktur organisasi di lingkungan LPD, maka semakin efektif pengelolaan LPD dalam meningkatkan kepercayaan para prinsipal sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja LPD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggayana dan Wirajaya (2019) menyatakan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khrisna (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian lainnya oleh Cahya (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan sehingga kelangsungan usaha jangka panjang dapat terjaga. Semakin bertanggungjawab LPD dalam mematuhi seluruh peraturan yang ada dan menjalankan tanggung jawab kepada prinsipal maka akan berdampak pada pertumbuhan LPD sehingga semakin meningkatkan kinerja LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Ramantha (2018) menemukan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Hal senada juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) yang menemukan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal dan Petang. Namun penelitian oleh Sastra dan Erawati (2017) menemukan bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Luwih dan Muliarta (2018) yang menyatakan tanggung jawab berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Independensi adalah sikap perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa terikat dengan pihak manapun atau pihak yang mendominasi. Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus bersikap secara objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan. Semakin bebas dari konflik kepentingan dalam pengelolaan LPD maka semakin meningkat kepercayaan prinsipal serta kinerjanya dan memastikan LPD bisa bersikap objektif dalam

pengelolaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Putri (2018) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Gianyar. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggayana dan Wirajaya (2019) yang menemukan bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian oleh Sastra dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan stakeholder yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu memperhatikan hak-hak stakeholder berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan guna meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang baik. Apabila pengelola LPD memperhatikan hak-hak prinsipal dan memperlakukannya secara adil berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan maka dapat meningkatkan kinerja LPD. Berdasarkan penelitian Mahaendrayasa dan Putri (2017) menyatakan bahwa *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreana dan Wirajaya (2018) yang menemukan bahwa prinsip kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Namun, penelitian lainnya oleh Cahya (2017) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya perbedaan mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh**

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani adalah sebagai berikut.

- (1) Terjadi permasalahan yang mempengaruhi kinerja keuangan lembaga perkreditan desa.
- (2) Tingkat kesehatan kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani lebih rendah di bandingkan LPD di Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku.
- (3) Terdapat banyak variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa.
- (4) Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?
- (2) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?
- (3) Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?
- (4) Bagaimana pengaruh responsibilitas terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?
- (5) Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?
- (6) Bagaimana pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji tentang hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.
- (2) Pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.
- (3) Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.
- (4) Pengaruh responsibilitas terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.
- (5) Pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.
- (6) Pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- (1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih luas terkait bagaimana pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan referensi atau perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

(2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada Lembaga Perkreditan Desa terkait masalah pengelolaan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

